KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

KAJIAN FISKAL REGIONAL

Triwulan I 2019

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

TINJAUAN PERKEMBANGAN FISKAL REGIONAL TRIWULANAN *(Quarterly Flash Report)*
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TRIWULAN I TAHUN 2019

I. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL

A. Produk Domestik Regional Bruto

Pertumbuhan ekonomi Kalbar pada Triwulan I tahun 2019 mencapai sebesar 5,07 persen, lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2018 yaitu 5,11 persen (yoy) dan sama dengan pertumbuhan ekonomi nasional Triwulan I tahun 2019 sebesar 5,07 persen. PDRB Kalbar berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan tahun 2010 (ADHK) sebesar Rp33,76 triliun, sedangkan berdasarkan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) mencapai sebesar Rp51,24 triliun.

Grafik I.1 Pertumbuhan PDRB Provinsi Kalbar s.d Triwulan I Tahun 2018 dan 2019 (q to q)

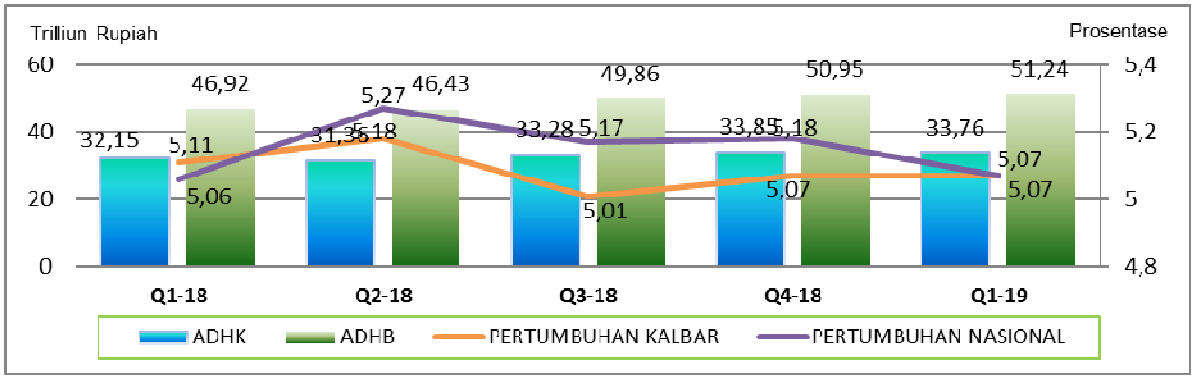

Sumber data: BPS Kalimantan Barat

Pertumbuhan PDRB (q-to-q) dari sisi produksi tertinggi dicapai pada Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 20,23 persen, sementara itu dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang melayani Rumah Tangga (PK-LNRT) sebesar 2,57 persen.

Pertumbuhan perekonomian Kalbar pada Triwulan I 2019 sebesar 5,07 persen dengan pertumbuhan tertinggi (y-on-y) dicapai Lapangan Usaha Informasi dan komunikasi yang tumbuh 11,88 persen disebabkan adanya penambahan/peningkatan 7 BTS (base transceiver station), berupa mobil Combat, yang dilakukan oleh Telkomsel untuk wilayah Kalimantan Barat, sebagai langkah antisipasi terhadap melonjaknya traffic dan payload yaitu terjadinya peningkatan komunikasi serta penggunaan data internet yang tinggi menjelang pemilu dan perayaan Imlek, Cap Go Meh dan sembayang kubur, selanjutnya lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian tumbuh sebesar 9,33 persen disebabkan adanya peningkatan permintaan ekspor hasil produksi pertambangan biji logam (biji besi). Pertumbuhan lapangan usaha Jasa Lainnya tumbuh sebesar 8,11 persen karena adanya perayaan Hari Besar Keagamaan. Disisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang melayani Rumah Tangga (PK-LNRT) yang tumbuh sebesar 10,07 persen disebabkan adanya kenaikan kelompok makanan dan minuman, kesehatan, komunikasi dan pendidikan dalam rangkaian perayaan keagamaan (Cap Go Meh, Hari Raya Nyepi) dan persiapan kegiatan pilpres yang jatuh di awal triwulan II 2019

B. Inflasi

Kalbar Triwulan I tahun 2019 mengalami inflasi 0,89 persen, angka ini lebih rendah lebih rendah dibandingkan inflasi periode yang sama tahun 2018 yang tercatat sebesar 1,19 persen dan apabila dibandingkan dengan inflasi nasional lebih tinggi 0,54 persen yakni sebesar 0,35

persen, inflasi triwulan I 2019 cenderung menurun yaitu pada bulan Januari 2019 sebesar 0,55 persen, terus mengalami penurunan bahkan terjadi deflasi pada bulan Februari 2018 sebesar -0,53 persen dan terus mengalami penurunan hingga deflasi pada bulan Maret 2019 yaitu sebesar -0,19 persen.

Grafik I.2 Pergerakan Tingkat Inflasi Provinsi Kalbar dan Nasional s.d Triwulan I Tahun 2019

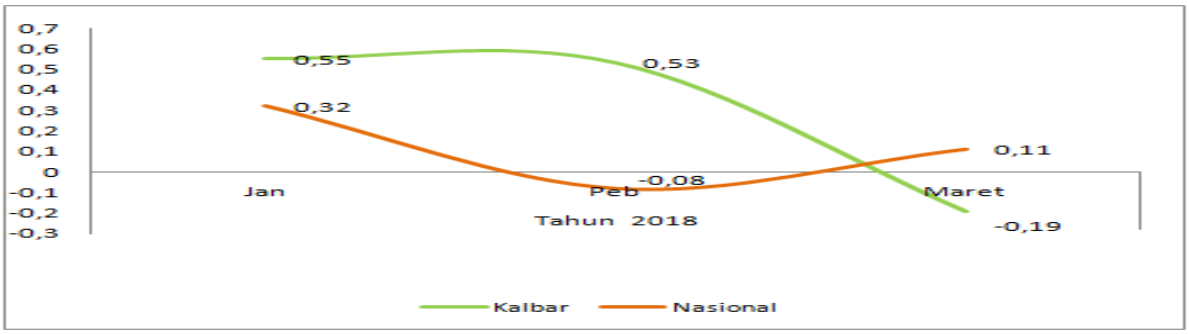

Sumber data: BPS kalimantan Barat (diolah)

Target inflasi Kalbar tahun 2019 seperti yang tertuang di dalam RPJMD adalah kisaran 3,80 persen. Triwulan I 2019 terjadi inflasi sebesar 0,89 persen lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Tekanan deflasi pada bulan Maret 2019 adanya penurunan indek pada kelompok pengeluaran yaitu kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 2,365 persen, hal ini disebabkan oleh kenaikan tarif angkutan udara, aktivitas persiapan pilpres dan momen hari besar keagamaan. Terdapat beberapa risiko inflasi yang perlu diperhatikan yaitu masih tingginya tarif angkutan udara dan ekstrimnya kondisi cuaca yang dapat menghambat pasokan bahan makanan di wilayah Kalimantan Barat.

C. Indikator Kesejahteraan

Sebagai salah satu tolok ukur kinerja kebijakan fiskal di wilayah Propinsi Kalimantan Barat akan tercermin dari keberhasilan dalam mencapai sasaran indikator makro pembangunan yang tertuang di dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA APBD) Tahun 2019 terdapat 3 (tiga) indikator menunjukan tren perbaikan yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) periode September 2018 menunjukkan angka 7,37 , dan Angka Kemiskinan periode 2018 mencapai 66,98, sementara itu untuk Angka Pengganguran berdasarkan data bulan Februari 2019 adalah sebesar 4,14. Kalau dilihat dari capaian ketiga indikator tersebut bahwa target yang telah ditetapkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA APBD) Tahun 2019 pada triwulan I 2019 masih belum tercapai.

Pencapaian sasaran indikator makro pembangunan diharapkan dapat diwujudkan diantaranya melalui kebijakan fiskal di Provinsi Kalbar baik melalui APBN maupun APBD.

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalbar termasuk kategori “sedang” terjadi peningkatan dari 66,26 poin tahun 2017 menjadi sebesar 66,98 poin pada tahun 2018 (berdasarkan *release* BPS periode Mei 2019). Walaupun terjadi kenaikan namun capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalbar sampai dengan triwulan I tahun 2019 belum memenuhi target yang telah ditetapkan yakni sebesar 67,20 poin.

Dalam kurun waktu 2014-2018 angka IPM Kalbar mengalami tren perbaikan dan pada tahun 2018 berada pada urutan 30 dari 34 provinsi. Dilihat dari angka rata-rata lama sekolah masyarakat Kalimantan Barat mengalami pertumbuhan yang positif sekitar 7,12 tahun.

Grafik I.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2014 s.d. 2018

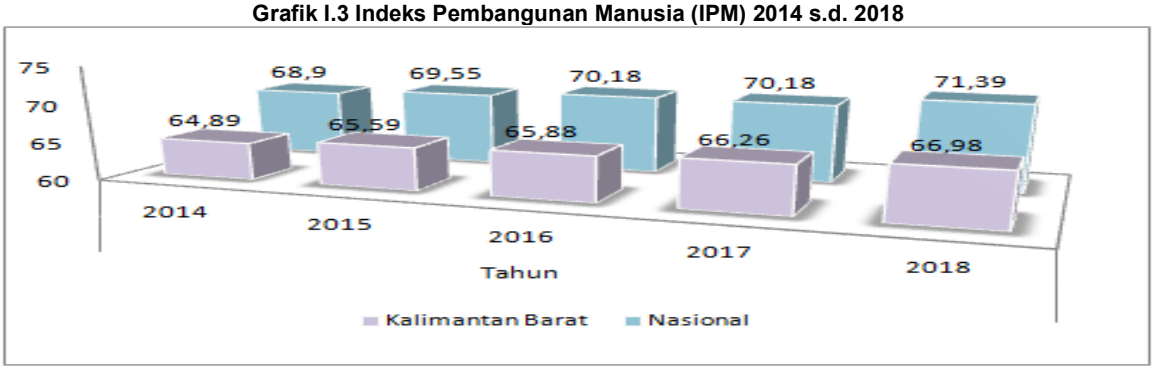

Sumber: Kalimantan Barat dalam Angka 2019, BPS

Peningkatan IPM di tingkat provinsi juga tercermin pada level kabupaten/kota. Selama periode 2017 sampai dengan 2018, seluruh kabupaten/kota mengalami peningkatan IPM. Pada periode ini, tiga kabupaten/kota dengan pembangunan manusia paling cepat, yaitu Kabupaten Mempawah dengan kenaikan 1,41 persen, Kabupaten Sintang 1,4 persen, dan Kabupaten Kuburaya 1,39 persen, kemajuan pembangunan tersebut didorong oleh dimensi pendidikan.

2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Sasaran pembangunan pada indikator angka pengangguran Provinsi Kalbar tahun 2019 adalah 4,19 persen dengan menggunakan *release* periode Februari 2019 menunjukan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) periode bulan Februari 2019 adalah 4,14 persen, capain ini sudah memenuhi target yang telah ditetapkan.

Grafik I.4 Indikator Ketenagakerjaan Provinsi Kalbar

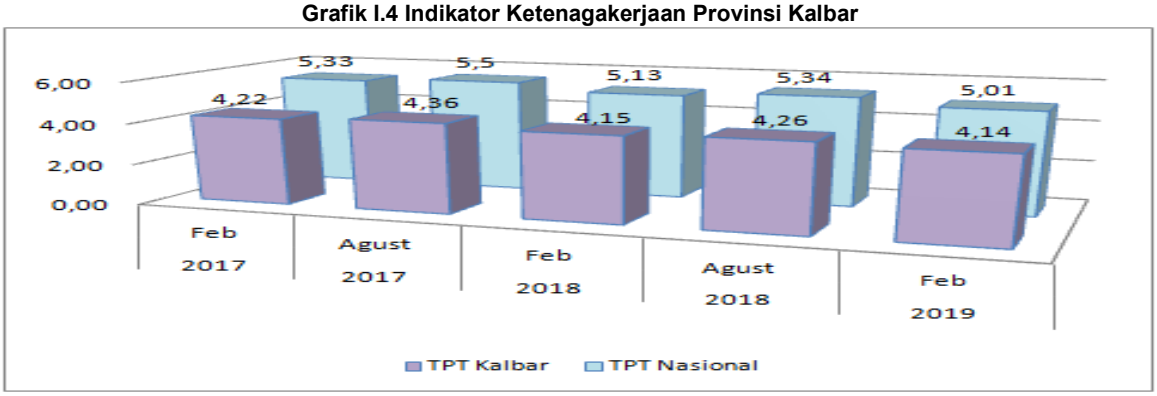

Sumber data : BPS Provinsi Kalimantan Barat, (diolah)

Jumlah pengangguran Februari 2019 sebanyak 107 ribu jiwa dan kondisi pada periode ini adanya kenaikan apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2018. Hal ini disebabkan menurunnya struktur lapangan usaha pada sektor pertanian, sektor perdagangan dan sektor industri yang selama ini menjadi penyumbang terbesar penyerapan tenaga kerja, yaitu dari 53,11 persen menjadi 49,58 persen.

3. Tingkat Kemiskinan

Sasaran angka kemiskinan Provinsi Kalbar tahun 2018 ditetapkan sebesar 7,51 persen, sementara itu data yang tersedia adalah periode September 2018, dimana Tingkat Kemiskinan Provinsi Kalbar adalah 7,37 persen namun masih lebih baik apabila dibandingkan dengan Tingkat Kemiskinan Nasional yang mencapai sebesar 9,66 persen.

Grafik I.5 Tingkat Kemiskinan Provinsi Kalbar

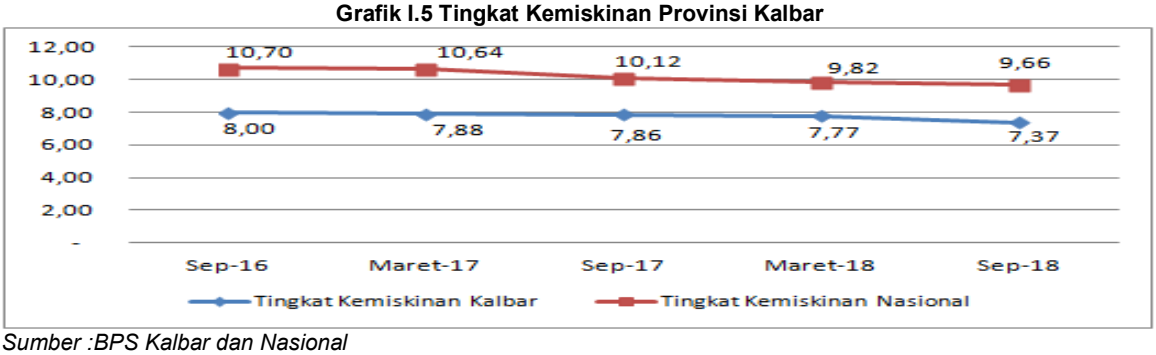

Sumber :BPS Kalbar dan Nasional

Tingkat kemiskinan ini mengalami kenaikan dibandingkan periode Maret 2018 yang mencapai sebesar 7,37 persen. Hal ini dipengaruhi jumlah penduduk miskin Provinsi Kalbar yang mengalami penurunan dari 387,080 orang pada Maret 2018 menjadi 369.730 orang September 2018.

Grafik I.6 Indeks Kedalaman dan Keparahan Provinsi Kalbar

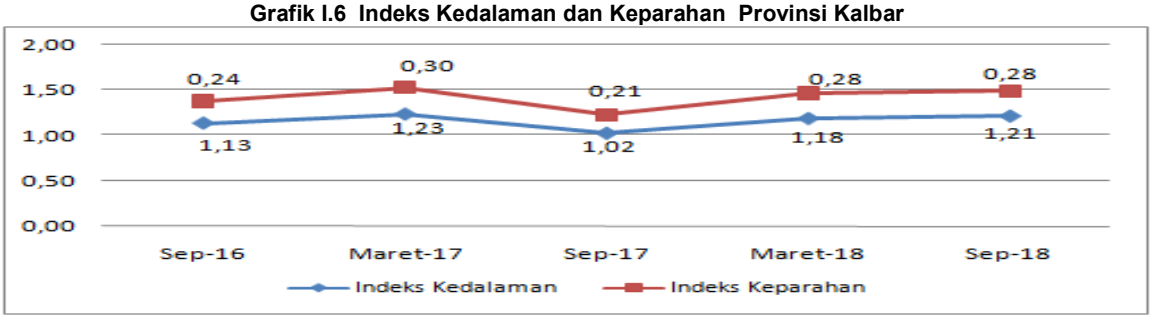

Sumber :BPS Kalbar dan Nasional

Pada periode bulan September 2018 Indeks Kedalaman Kemiskinan mengalami peningkatan sebesar 0,03 persen yakni sebesar 1,206 dibandingkan periode Maret 2018 yang hanya 1,184. Kondisi ini menunjukan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin menjauh dari garis kemiskinan, hal ini tidak terlepas peranan sumbangan komoditi makanan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan peranan komoditi bukan makanan terhadap garis kemiskinan yaitu sebesar 77,97 persen.

Indeks Keparahan kemiskinan juga menunjukan adanya peningkatan yaitu 0,284 pada Maret 2018 menjadi 0,279 pada September 2018, dengan tingkat keparahan kemiskinan di perkotaan mengalami penurunan dari 0,207 pada Maret 2018 menjadi 0,152 pada bulan September 2018 sedangkan daerah perdesaan mengalami peningkatan dari dari 0,316 pada bulan Maret 2018 menjadi 0,353 pada bulan September 2018 hal ini menunjukan adanya ketimpangan pengeluaran antar sesama penduduk miskin terutama di daerah perdesaan.

II. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN

Perkembangan realisasi pendapatan dan belanja negara lingkup Provinsi Kalbar Triwulan I tahun 2019 untuk realisasi pendapatan negara mencapai 27,59 persen dari target sedangkan realisasi belanja negara telah mencapai 20,94 persen dari pagu anggaran. Kontribusi pendapatan negara terhadap APBN Provinsi Kalbar sampai dengan periode triwulan I tahun 2019 mencapai sebesar Rp2.351,40 miliar, hal tersebut belum cukup untuk menutupi belanja negara sebesar Rp6.207,29 miliar sehingga terjadi defisit sebesar Rp3.855,89 miliar.

Tabel II.1 Pagu dan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Kalbar s.d. Akhir Triwulan I Tahun 2018 dan Tahun 2019

(dalam miliar Rp)

URAIAN		Tahun 2018		Tahun 2019	
		Target/Pagu	Realisasi	Target/Pagu	Realisasi
A. PENDAPATAN NEGARA		**7.998,64**	**1.407,01**	**8.522,34**	**2.351,40**
I. PENERIMAAN DALAM NEGERI		**7.901,85**	**1.405,67**	**8.516,17**	**2.351,40**
1	Penerimaan Pajak	7.294,09	1.183,77	7.823,35	1.924,59
2	PNBP	337,63	112,08	455,08	237,72
3	Bea dan Cukai	270,13	109,82	237,74	189,09
II. HIBAH		**96,79**	**1,34**	**6,17**	**0,003**
1	Hibah	96,79	1,34	6,17	0,003
B. BELANJA NEGARA		**29.689,36**	**5.924,77**	**29.641,05**	**6.207,29**
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT		**10.097,50**	**1.302,79**	**8.949,71**	**1.259,70**
1	Belanja Pegawai	3.207,95	602,07	3.205,25	675,32
2	Belanja Barang	3.630,72	354,77	3.774,46	486,44
3	Belanja Modal	3.246,49	345,95	1.956,72	97,94
4	Belanja Bantuan Sosial	12,34	-	13,28	-
5	Belanja Lain-lain	-	-	-	-
II.TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA		**19.591,86**	**4.621,98**	**20.691,34**	**4.947,59**
1	Transfer ke Daerah	17.896,00	4.394,42	18.698,77	4.570,39
	a. Dana Perimbangan	17.753,00	4.362,80	18.571,24	4.506,62
	1) Dana Alokasi Umum	11.821,00	3.899,40	12.122,39	4.025,97
	2) Dana Bagi Hasil	748,00	107,73	792,47	97,16
	3) Dana Alokasi Khusus	5.184,00	355,67	5.656,38	383,49
	b. Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	c. Dana Keistimewaan Yogyakarta	-	-	-	-
	d. Dana Transfer Lainnya	143,00	31,62	127,53	63,77
2	Dana Desa	1.695,86	227,56	1.992,57	377,20
C. SURPLUS DEFISIT		**(21.690,72)**	**(4.517,76)**	**(21.118,71)**	**(3.855,89)**

Sumber data :Monev Pa, OM SPAN, Kanwil Pajak Prov. Kalbar, Kanwil BC Prov. Kalbar

A. Pendapatan Negara

1. Penerimaan Perpajakan

Capaian penerimaan perpajakan Provinsi Kalbar sampai dengan triwulan I 2019 sebesar Rp 1.92 triliun atau tercatat 24.60 persen dari target tahun 2019 yang sebesar Rp7.82 triliun. Terjadi peningkatan penerimaan sebesar Rp740,83 miliar atau 62,58 persen jika dibandingkan dengan penerimaan periode yang sama tahun 2018.

a. Pajak Penghasilan (PPh)

Grafik II.1
Realisasi Penerimaan PPh sd Triwulan I 2019 Provinsi Kalimantan Barat (miliar rupiah)

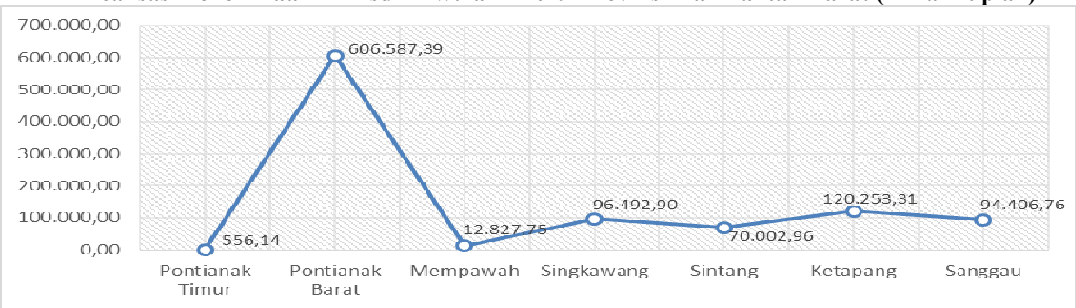

Sumber data OMSPAN

Penerimaan PPh Kalimantan Barat sampai dengan bulan Maret 2019 adalah sebesar Rp1,01 triliun naik 60,25 persen jika dibandingkan dengan penerimaan PPh periode yang sama tahun sebelumnya. Memberikan kontribusi 52.02 persen terhadap total penerimaan pajak. Wilayah penerimaan Pontianak Barat memberikan kontribusi penerimaan PPh terbesar yaitu Rp606,58 miliar atau 60.59 persen hal ini disebabkan terkonsentrasinya tenaga kerja yang bekerja di Kota Pontianak sebagai pusat perekonomian. Disusul penerimaan dari wilayah Kab. Ketapang yang didukung dengan keberadaan kawasan industri Ketapang memberikan kontribusi sebesar Rp120,25 miliar atau 12,01 persen.

b. Pajak Pertambahan Nilai (PPn)

Grafik II.2
Realisasi Penerimaan PPn sd Triwulan I 2019 Provinsi Kalimantan Barat (miliar rupiah)

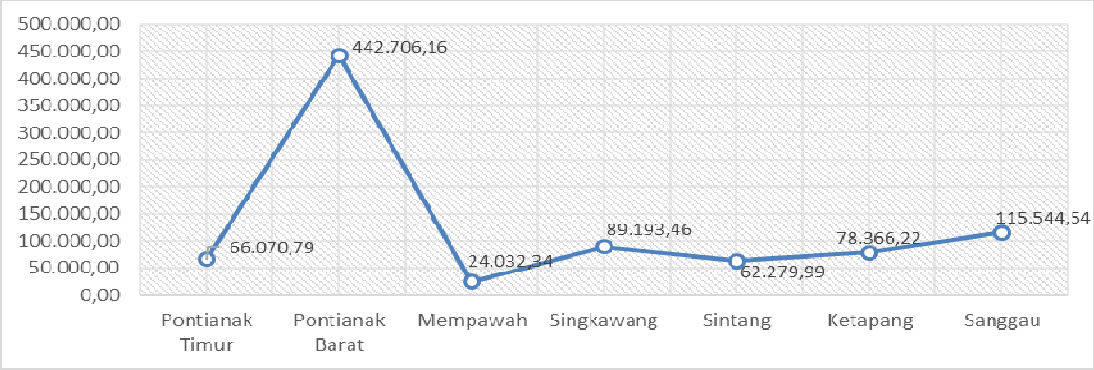

Sumber data OMSPAN

Penerimaan PPn di Kalbar di triwulan I 2019 mencapai Rp878,25 miliar atau 45,63 persen terhadap total penerimaan pajak, mengalami kenaikan 64,49 persen dibanding periode yang sama tahun 2018. Kenaikan ini di dorong oleh peningkatan penjualan komoditas barang konsumsi. Penerimaan pajak pertambahan nilai terbesar masih di sektor perdagangan, disusul industri pengolahan. Kota Pontianak sebagai pusat perekonomian menjadi kontributor terbesar dalam menyumbang penerimaan PPn yaitu sebesar Rp442,70 miliar atau 50.41 persen, disusul oleh Kabupaten Sanggau sebesar Rp115.54 miliar atau 13.16 persen. Sementara itu Singkawang memberikan kontribusi terbesar ketiga sebesar Rp.89,19 miliar atau 10,16 persen.

c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Grafik II.3
Realisasi Penerimaan PPnBM sd Triwulan I 2019 Provinsi Kalimantan Barat (miliar rupiah)

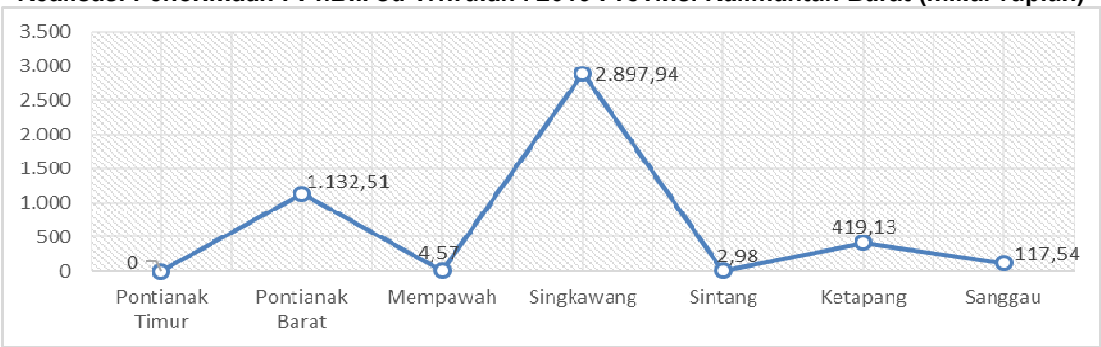

Sumber data OMSPAN

PPNBM merupakan pajak yang dipungut atas konsumsi suatu barang mewah. Di Provinsi Kalbar penerimaan PPnBM sampai bulan Maret 2019 sebesar Rp4,57 miliar atau 0.24 persen terhadap total penerimaan pajak dan sebagian besar berasal dari Kota Singkawang sebesar Rp2,89 miliar atau 63 persen. Disusul penerimaan dari wilayah Kota Pontianak sebesar Rp1,13 miliar atau 25 persen.

d. Bea Masuk, Bea Keluar dan Cukai

Grafik II.4
Penerimaan Bea Masuk, Bea Keluar dan Cukai Triwulan I 2019

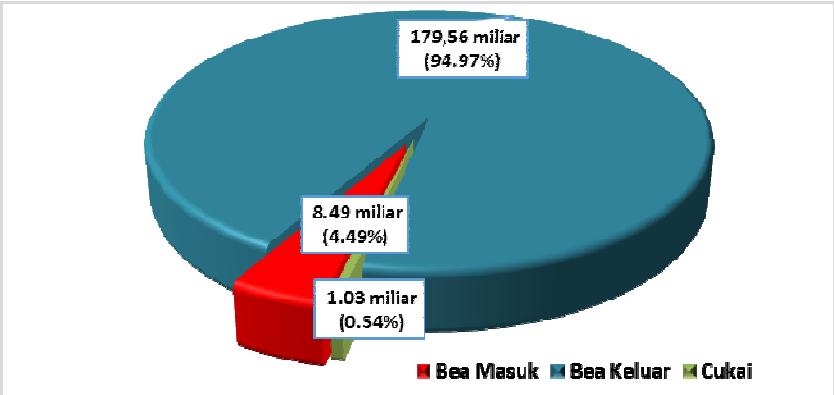

Tercatat penerimaan Bea Masuk, Bea Keluar dan Cukai sampai dengan triwulan I 2019 mencapai Rp189,08 meningkat 72,18 persen bila dibandingkan penerimaan periode yang sama tahun sebelumnya. dengan perincian Bea masuk Rp8,49 miliar atau 4,49 persen , Bea Keluar Rp179,56 miliar atau 94,97 persen dan Cukai Rp1,03 miliar atau 0,54 persen. Terdapat peningkatan penerimaan sebesar 72,18 persen jika dibandingkan dengan penerimaan tahun sebelumnya. Berdasarkan perkembangan ekspor dan impor luar negeri Kalimantan Barat, sepanjang triwulan I 2019 terpantau masih berada pada kondisi surplus, hal ini terjadi seiring dengan peningkatan yang lebih tinggi pada komponen ekspor luar negeri terhadap impor luar negeri. Neraca perdagangan luar negeri Kalimantan Barat pada triwulan I 2019 mengalami surplus sebesar Rp171,07 miliar.

Gubernur Kalbar Sutarmijdi mengusulkan para pelaku usaha di manapun selama usahanya beroperasi di Kalbar agar memiliki (Nomor Pokok Wajib Pajak) NPWP Kalbar. Dengan memiliki NPWP Kalbar akan membantu pembiayaan pembangunan di Kalbar.Kalau NPWP di luar Kalbar maka pajaknya diterima daerah luar padahal perusahaan beroperasi di Provinsi Kalbar. Saat ini separo lebih daerah di Indonesia termasuk Kalbar ketergantungan dana dari pusat rata-rata lebih dari 70 persen. *Kalbar.antaranews*

2. Pendapatan Negara Bukan Pajak

Penerimaan PNBP terdiri dari 4 jenis yakni PNBP Sumber Daya Alam (SDA) , PNBP Badan Layanan Umum (BLU), PNBP Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) dan PNBP Lainnya. Untuk wilayah Kalimantan Barat hanya terdiri atas PNBP Lainnya dan PNBP BLU, tidak terdapat penerimaan PNBP Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan

(KND) dan juga PNBP SDA, meskipun di wilayah Kalimantan Barat terdapat usaha pertambangan, dikarenakan PNBP SDA merupakan penerimaan terpusat dan langsung masuk ke Bagian Anggaran BUN.

Grafik II.5
Realisasi Pendapatan PNBP Periode Triwulan I 2019

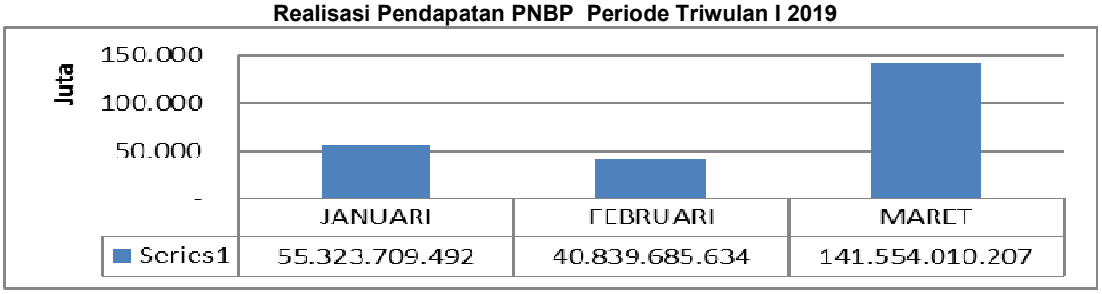

sumber data OMSPAN

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Provinsi Kalimantan Barat sampai akhir Maret 2019 berjumlah Rp237.71 miliar . Jumlah ini meningkat 169,68 persen dibanding periode yang sama tahun 2018 yang hanya mencapai Rp88.14 miliar. Penerimaan terbesar terjadi di bulan Maret 2019 sebesar Rp141,44 miliar. Penerimaan PNBP triwulan I 2019 berasal dari PNBP lainnya Rp 125,11 miliar dan PNBP BLU sebesar Rp112,60 miliar.

a. PNBP lainnya

Pendapatan PNBP lainnya pada periode triwulan I 2019 ini memberikan kontribusi sebesar Rp125,11 miliar atau 52.63 persen dari total penerimaan PNBP. Jumlah ini meningkat 32,1 persen dibanding periode yang sama tahun 2017 yang hanya mencapai Rp92,60.14 miliar. Penerimaan terbesar terjadi di bulan Januari senilai Rp55.32 miliar diikuti penerimaan bulan Februari Rp40.83 miliar. Komposisi pendapatan terbesar adalah pendapatan Pelayanan Kepolisian sebesar Rp26.07 miliar disusul pendapatan pendidikan sebesar Rp 18.38 miliar. Besarnya pendapatan pelayanan Kepolisian ini didominasi oleh Pendapatan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sebesar Rp12,95 miliar atau 49.78 persen. Selanjutnya Pendapatan Penerbitan STNK sebesar Rp7,81 miliar atau 30.05 persen.

b. PNBP BLU

Grafik II.6
Realisasi Pendapatan PNBP BLU Periode Triwulan I 2019

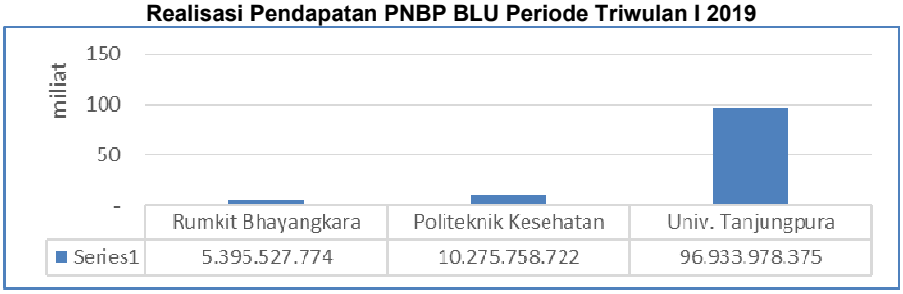

sumber data OMSPAN

Terdapat tiga satker BLU di Provinsi Kalimantan Barat yakni RS Bhayangkara Pontianak, Politeknik Kesehatan Pontianak dan Universitas Tanjung Pura Pontianak. Sampai dengan akhir triwulan I 2019 pendapatan BLU tercatat sebesar Rp112.60 miliar . Pendapatan ini

memberikan kontribusi sebesar 47,37 persen dari total penerimaan PNBP . Dari sektor pendidikan Politeknik Kesehatan Pontianak dan Universitas Tanjung Pontianak menyumbang sebesar Rp114.98 miliar. Atau 95,21 persen. Sedangkan dari sektor kesehatan, Rumah Sakit Bhayangkara berkontribusi sebesar Rp5.39 miliar atau 4,79 persen

Dalam rangka evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran PNBP, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan Rapat Koordinasi Forum Komunikasi PNBP Kalimantan Barat Tahun 2019 pada tanggal 25 April 2019 dengan tema "Pemanfaatan BMN dalam rangka Optimalisasi PNBP Kalbar" sekaligus menggali potensi PNBP yang dimiliki satker terkait pemanfaatan BMN sebagai obyek PNBP. Rakor diikuti 90 satker PNBP di wilayah Provinsi Kalimantan Barat. *pontianak pos*

3. Pendapatan Hibah

Grafik II.7
Realisasi Pendapatan HibahPeriode Triwulan I 2019

Uraian	Pagu	Realisasi s.d Triwulan I 2019	(%) Realisasi atas Pagu
Hibah Barang	-	-	-
Hibah Langsung (uang)	6.126.200.000	3.977.119	0,06%
Total Hibah	6.126.200.000	3.977.119	0,06%

Sumber: Monev.pa

Pendapatan hibah adalah Penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri. Pendapatan hibah merupakan salah satu komponen APBN sebagai bagian dari penerimaan negara yang harus dipertanggung jawabkan melalui mekanisme APBN, sampai dengan triwulan I 2019 pendapatan hibah langsung sebesar Rp 6,12 miliar dengan realisasi Rp 3.97 juta atau 0,06 persen. Terdapat penurunan pendapatan hibah langsung sebesar 93.67 persen jika dibandingkan dengan pendapatan hibah tahun sebelumnya pada periode yang sama. Satker penerima alokasi hibah periode triwulan I 2019 adalah Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum sebesar Rp4,52 miliar atau 73,78 persen, dan Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VIII Pontianak sebesar Rp1,60 miliar atau 26,22 persen.

4. Pengelolaan BLU

Tahun 2019 dalam wilayah kerja Kanwil DJPB Kalbar terdapat 3 (tiga) satker BLU yakni Rumah Sakit Bhayangkara , Politeknik Kesehatan Pontianak dan Universitas Tanjung Pura Pontianak. Satker BLU Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak memiliki layanan kesehatan

unggulan DVI (Disaster Victim Identification) serta pembuatan VER (Visum et Repertum). Tahun 2019 RS Bhayangkara memiliki pagu anggaran sebesar Rp38.81 miliar yang terdiri dari pagu RM sebesar Rp6.81 miliar dan pagu BLU sebesar Rp 32 miliar . Sampai dengan triwulan I 2019 realisasi belanja sebesar Rp8.34 miliar .

Tabel II.1
Perkembangan Realisasi Belanja Satker BLU di Provinsi Kalbar Triwulan I 2018 dan Triwulan I 2019
(miliar rupiah)

Satker BLU	2018				2019			
	RM		BLU		RM		BLU	
	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
Rumkit Bhayangkara	7,01	1,50	31,00	7,58	6,81	1,73	32,00	6,61
Politeknik Kesehatan	45,45	5,13	27,05	2,11	42,49	6,98	27,06	1,32
Universitas Tanjungpura	196,48	34,89	178,20	-	192,15	35,46	209,60	7,75

Sumber: monevPa

Satker BLU Politeknik Kesehatan Pontianak memberikan layanan pendidikan kesehatan meliputi jurusan kesehatan lingkungan, jurusan Gizi, Kesehan Gigi, Kebidanan, Keperawatan, serta analis kesehatan. Tahun 2019 memiliki pagu anggaran sebesar Rp69,55 miliar , yang terdiri dari pagu RM Rp42.49 miliar dan pagu BLU Rp27.06 miliar. Sampai dengan triwulan I 2019 realisasi belanja sebesar Rp8.30 miliar lebih tinggi 14.64 persen jika dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun sebelumnya.

Satker BLU Universitas Tanjung Pura Pontianak merupakan satker BLU yang memberikan layanan pendidikan di sembilan fakultas dengan jenjang pendidikan hingga strata dua. Tahun 2019 memiliki pagu anggaran sebesar Rp401.75 miliar serta realisasi sampai dengan triwulan I 2018 sebesar Rp43.21 miliar.

B. Belanja Negara

Belanja negara lingkup Provinsi Kalbar Tahun 2019 dapat dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer Daerah dan Dana Desa, adapun perkembangan sampai dengan Triwulan I Tahun 2019, sebagai berikut:

1. Belanja Pemerintah Pusat

Grafik II.8
Tren Realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bantuan Sosial Lingkup Provinsi Kalbar Triwulan I Tahun 2019

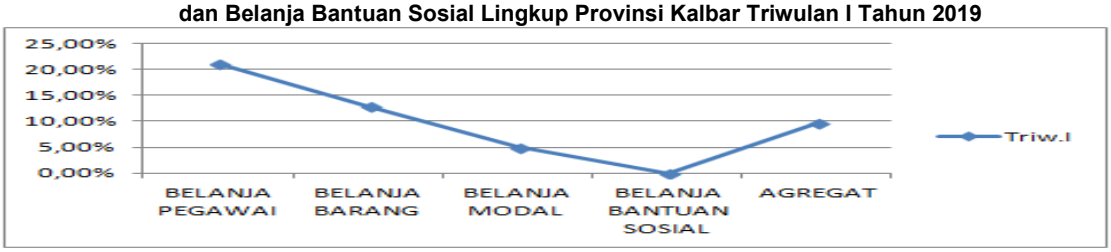

Sumber data: Monev PA(diolah)

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat sampai dengan Triwulan I tahun 2019 sebesar Rp1.259,70 milliar atau 14,08 persen dari pagu, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2018 terjadi kenaikan 1,17 persen. Realisasi belanja dari yang terbesar yaitu Belanja Pegawai sebesar Rp675,32 miliar atau 21,07 persen, Belanja Barang sebesar Rp486,44 milliar atau 12,89 persen, Belanja Modal sebesar Rp97,94 milliar atau 5,01 persen . Tren perkembangan realisasi Belanja sampai dengan triwulan I 2019 menunjukan bahwa Belanja Pegawai mencapai sebesar 21,07 persen, hal ini disebabkan adanya rutinitas pembayaran Gaji Pegawai sedangkan belanja yang lainya belum maksimal terutama belanja bantuan sosial belum terdapat realisasi.

2. Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)

Grafik II.9 Tren Realisasi Dana Transfer dan Dana Desa Lingkup Provinsi Kalbar Triwulan III Tahun 2018

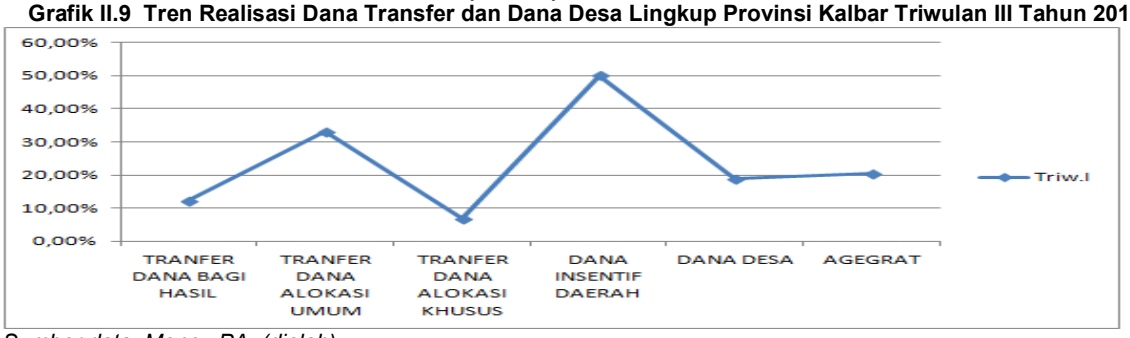

Sumber data: Monev PA (diolah)

Realisasi Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa sampai dengan Triwulan I tahun 2019 sebesar Rp4.947,59 miliar atau 23,92 persen dari pagu, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2018 terjadi kenaikan sebesar Rp325,61 miliar atau 0,32 persen. Realisasi TKDD yaitu Belanja DAU sebesar Rp4.025,97 miliar atau 33,21 persen, Belanja DBH sebesar Rp97,16 atau 12,26 persen, Belanja DAK sebesar Rp383,49 miliar atau 6,78 persen, Belanja Tranfer lainnya sebesar Rp63,77 miliar atau 50,00 persen dan Transfer Dana Desa sebesar Rp377,20 atau 18,93 persen. Tren perkembangan realisasi Belanja sampai dengan triwulan I 2019 menunjukan bahwa realisasi Belanja Dana Intensif Daerah (DID) menunjukan adanya perbaikan apabila dibandingkan dengan realisasi triwulan I 2018 yaitu yang hanya sebesar 22,11 persen.

4. Manajemen Investasi Pusat

Sampai dengan triwulan I tahun 2019 masih terdapat 1 (satu) pinjaman BUMD dan Pemda atas nama debitur Pemerintah Kota Singkawang dengan sisa hutang sebesar Rp17.666.354.370,24 yang telah diselesaikan melalui proses pelaksanaan *debt swap* sebesar Rp13.986.919.287,15 dan penghapusan utang murni Rp3.679.435.083,09. Pemerintah Kota Singkawang telah merealisasikan program *debt swap* dengan *alokasi* APBD tahun anggaran 2017 melalui DPPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa kegiatan Pembangunan Bangsal Ruang Inap Kelas I RSUD Abdul Aziz di Singkawang dengan realisasi sebesar Rp14.407.200.000 dan kondisi fisik pekerjaan sudah mencapai 100 persen.

Tabel II.3 Ringkasan Rekonsiliasi Outstanding Pinjaman BUMD dan Pemda Tahun 2019

No.	Instansi	No. Perjanjian	No. Loan (ID)	Sisa Pinjaman	Keterangan
1	Pemerintah Kota Singkawang	RDA-236/DP3/1996	2094101	17.666.354.370,24	Diselesaikan melalui program restrukturisasi sesuai surat Walikota Singkawang Nomor: 900/983/BKD tanggal 11 Oktober 2017, berdasarkan surat Direktur SMI nomor S-11978/PB/2017 tanggal 29 Desember 2017 persetujuan rencana pelaksanaan *debt swap*

Sumber: Kanwil DJPB

Investasi Pemerintah Pusat lainnya adalah Program Kredit Program berupa pemberian tambahan modal usaha kepada UMKM Wilayah Provinsi Kalimantan Barat, dalam triwulan I tahun 2019 telah mencapai sebesar Rp261,67 miliar (4.376 UMKM/debitur).

Tabel II.4 Penyaluran KUR Wilayah Kalimantan Barat Triwulan I Tahun 2019

No.	Kab./Kota	2017		2018		SD Triwulan I Tahun 2019	
		Akad	Debitur	Akad	Debitur	Akad	Debitur
1	Kalimantan Barat	1.070.000.000	34	1.650.000.000	29	35.000.000	2
2	Kab. Sambas	106.061.227.800	3.963	172.012.480.000	5.063	28.387.745.000	536
3	Kab. Mempawah	92.628.821.200	3.872	117.141.764.400	3.853	15.562.095.000	383
4	Kab. Sanggau	93.413.500.000	3.391	137.303.602.000	3.683	21.950.000.000	374
5	Kab. Ketapang	92.304.700.000	3.046	134.775.029.932	3.445	13.675.500.000	245
6	Kab. Sintang	127.052.840.000	2.909	169.583.544.950	3.539	24.281.000.000	349
7	Kab. Kapuas Hulu	62.871.500.000	2.383	74.602.388.591	2.755	10.941.000.000	314
8	Kab. Bengkayang	46.932.401.600	1.879	62.169.980.000	1.909	7.517.000.000	186
9	Kab. Landak	37.107.178.000	1.191	84.971.200.000	2.710	17.521.000.000	303
10	Kab. Sekadau	56.915.000.000	1.426	82.259.245.000	1.715	10.257.745.000	164
11	Kab. Melawi	35.905.500.000	977	60.856.245.000	1.378	12.941.000.000	148
12	Kab. Kayong utara	16.898.925.400	709	24.188.290.000	826	3.325.000.000	78
13	Kab. Kubu Raya	123.339.411.688	3.258	151.025.480.000	3.883	27.799.745.000	446
14	Kota Pontianak	176.990.064.000	4.221	256.541.689.000	4.730	52.575.125.000	628
15	Kota Singkawang	50.988.701.600	1.445	85.998.890.400	1.993	14.900.000.000	220
		1.120.479.771.288	34.704	1.615.079.829.273	41.511	261.668.955.000	4.376

Sumber: SIKP (diolah)

C. Prognosis Realisasi APBN

Perkiraan realisasi APBN sampai dengan akhir tahun 2019 diperoleh dengan menggunakan rata-rata penerimaan dan belanja negara dari data historis tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 sehingga ditemukan perkiraan pendapatan dan belanja negara di Prov. Kalbar sampai Triwulan IV tahun 2019.

Tabel II.5
Perkiraan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Kalbar s.d. Triwulan IV Tahun 2019

(Dalam miliar)

	URAIAN	Target / Pagu	Realisasi s.d Triwulan I		Perkiraan Realisasi s.d Triwulan IV	
			Rp	% Realisasi terhadap Pagu	Rp	% Perkiraan Realisasi terhadap Pagu
	PENDAPATAN NEGARA	**8.522,34**	**2.351,40**	**27,59%**	**7.691,41**	**90,25%**
1	**Penerimaan Pajak**	7.823,35	1.924,59	24,60%	6.403,55	81,85%
2	**PNBP**	455,08	237,72	52,24%	861,57	189,32%
3	**Bea dan Cukai**	237,74	189,09	79,54%	420,12	176,71%
4	**Hibah**	**6,17**	**0,003**	0,05%	**6,17**	100,00%
	BELANJA NEGARA	**29.641,15**	**6.207,29**	**20,94%**	**29.495,56**	**99,51%**
1	**Belanja Pemerintah Pusat**	8.949,71	1.259,70	**14,08%**	8.804,12	**98,37%**
2	**Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa**	20.691,44	4.947,59	**23,91%**	20.691,44	**100,00%**
	SURPLUS DEFISIT	**(21.118,81)**	**(3.855,89)**		**(21.804,15)**	

Sumber data: Monev PA, OMSPAN

Pendapatan Negara sampai dengan periode triwulan I tahun 2019 sebesar 27,59 persen dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp8.522,34 miliar, untuk realisasi Penerimaan

Pajak pada periode ini mencapai 24,60 persen dari pagu, dengan perkiraan penerimaan pajak sampai dengan triwulan IV tahun 2019 sebesar 81,84 persen atau Rp6.403,55 miliar, sedangkan Penerimaan Hibah masih terealisasi sebesar 0,05 persen dari pagu dengan perkiraan akhir tahun 2019 mencapai 100,00 persen.

Perkiraan belanja Negara akan terealisir sampai dengan akhir tahun 2019 akan mencapai sebesar Rp29.495,56 miliar atau 99,51 persen dari total pagu setelah APBN-P, termasuk didalamnya untuk belanja pemerintah pusat diperkirakan sebesar Rp8.804,12 miliar dan belanja transfer ke Daerah dan Dana Desa diperkirakan akan terserap sebesar Rp20.691,44 miliar. Penyerapan anggaran sampai dengan triwulan I 2019 telah mencapai sebesar Rp6.216,67 atau 20,97 persen hal ini disebakan rutinitas belanja pegawai mencapai 21,07 persen sedangkan Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa didominasi oleh Belanja Dana Alokasi Umum 33,21 persen dan belanja Belanja Dana Intensif Daerah mencapai 50,00 persen

III. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD

Realisasi Pendapatan Daerah pada Triwulan I tahun 2019 sebesar Rp 5,264,68 miliar atau 20,70 persen dari target yang telah ditetapkan dan mengalami kenaikan sebesar 2,86 persen dari periode yang sama tahun 2018. Distribusi realisasi pendapatan adalah sebagai berikut: Pendapatan Transfer mencapai Rp 4,522,22 miliar (85,90 persen), Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 699,95 miliar (13,30 persen), sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 42,30 miliar (0,8 persen).

Realisasi Belanja mencapai Rp 1.990,21 miliar atau 8,40 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan dan mengalami penurunan sebesar 0,76 persen dari periode yang sama tahun 2018. Belanja Pegawai sebesar Rp 1.242,33 miliar (62,42 persen), Belanja Barang sebesar Rp 399,33 miliar (20,08 persen) dan Transfer sebesar Rp 61,34 miliar (3,08 persen), sedangkan Belanja Modal sebesar Rp 18,04 miliar (3,08 persen).

Perkembangan realisasi APBD lingkup Provinsi Kalbar Triwulan I tahun 2019 untuk realisasi pendapatan mencapai 18,53 persen dari target sedangkan realisasi belanja mencapai 8,52 persen dengan rincian sebagai berikut :

Tabel III.1 Realisasi APBD Lingkup Provinsi Kalbar akhir Triwulan I Tahun 2018 dan Tahun 2019

(miliar rupiah)

URAIAN	2018		2019	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
PENDAPATAN	**24,433.26**	**4,357.95**	**25,434.50**	**5,264.68**
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**3,606.21**	**643.02**	**3,762.76**	**699.95**
Pajak Daerah	2,316.63	429.97	2,579.41	565.52
Retribusi Daerah	138.15	25.76	145.54	26.14
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	162.27	122.20	181.17	0.00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	989.17	65.10	856.64	108.29
PENDAPATAN TRANSFER	**19,768.97**	**3,709.58**	**20,721.81**	**4,522.42**
Dana Bagi Hasil Pajak atau Bagi Hasil Bukan Pajak	778.44	61.09	781.28	84.94
Dana Alokasi Umum	11,820.60	3,252.03	12,122.39	3,701.94
Dana Alokasi Khusus	5,186.71	279.26	5,656.38	365.46

URAIAN	2018		2019	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	764.67	0.09	691.29	0.04
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	1,200.05	117.12	1,470.48	370.03
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	18.50	0.00	0.00	
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**1,058.09**	**5.34**	**949.92**	**42.30**
Pendapatan Hibah	366.06	0.01	389.08	
Pendapatan Lainnya	482.69	5.34	560.84	42.30
BELANJA DAERAH	**24,998.29**	**2,101.01**	**26,044.05**	**1,990.21**
BELANJA OPERASI	**16,458.95**	**2,011.05**	**16,911.08**	**1,910.45**
Belanja Pegawai	8,415.58	1,222.99	9,357.25	1,242.33
Belanja Barang	6,068.72	205.09	5,996.93	399.33
Belanja Bunga	2.94	0.13	7.03	2.88
Belanja Subsidi	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Hibah	1,901.85	582.03	1,459.40	174.60
Belanja Bantuan sosial	69.87	0.81	90.47	91.30
BELANJA MODAL	**5,056.28**	**56.25**	**5,202.12**	**18.04**
Belanja Modal	5,056.28	56.25	5,202.12	18.04
BELANJA TAK TERDUGA	**31.10**	**0.42**	**32.13**	**0.39**
Belanja Tak Terduga	31.10	0.42	32.13	0.39
BELANJA TRANSFER	**3,451.97**	**33.30**	**3,898.72**	**61.34**
Transfer/Bagi Hasil Pendapatan	901.77	0.95	874.58	0.59
Belanja Bantuan Keuangan	2,550.20	32.34	3,024.14	60.74
SURPLUS/DEFISIT	**-565.03**	**2,256.94**	**-609.55**	**3,274.46**

Sumber: DPKAD Kab/Kota, diolah.

A. Pendapatan Daerah

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Grafik III.1 Realisasi PAD Triwulan I Tahun 2018 dan 2019

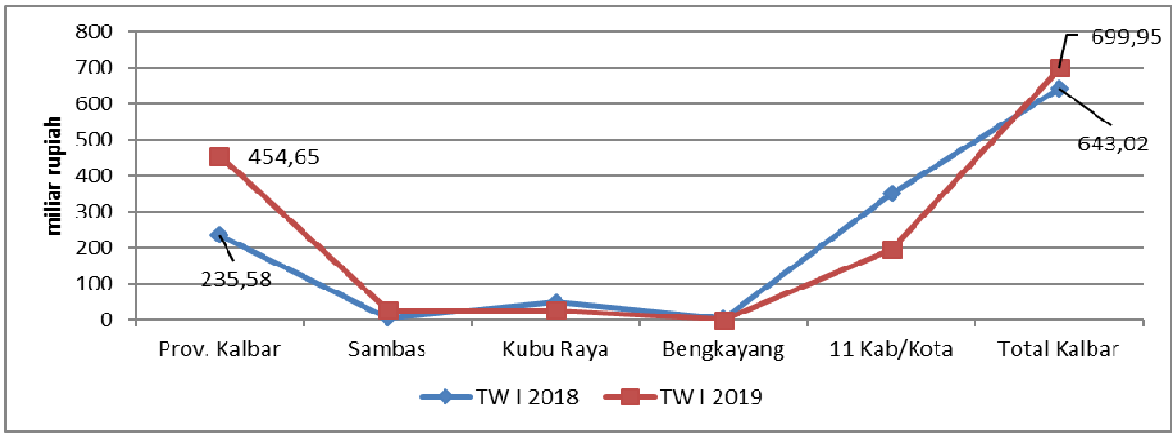

Sumber: DPKAD Kab/Kota, diolah.

Pada Triwulan I tahun 2019 realisasi PAD mencapai Rp 699,95 miliar atau 18,60 persen dari target sebesar Rp 3,762,76 miliar, terjadi kenaikan 0.77 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2018. Prosentase kenaikan penerimaan terbesar terjadi di Kab. Sambas yaitu sebesar Rp 588,6 persen, dan terendah Kabupaten Bengkayang 97 persen.

a. Penerimaan Pajak Daerah

Pada Triwulan I tahun 2019 Penerimaan Pajak Daerah Kalimantan Barat mencapai Rp 565.52 miliar atau 21.92 persen dari target sebesar Rp 2.579 miliar, terjadi kenaikan sebesar 3.32 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2018. Prosentase Kenaikan terbesar adalah Kab. Melawi sebesar 499 persen.

Grafik III.2 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah TW I Tahun 2018 dan 2019

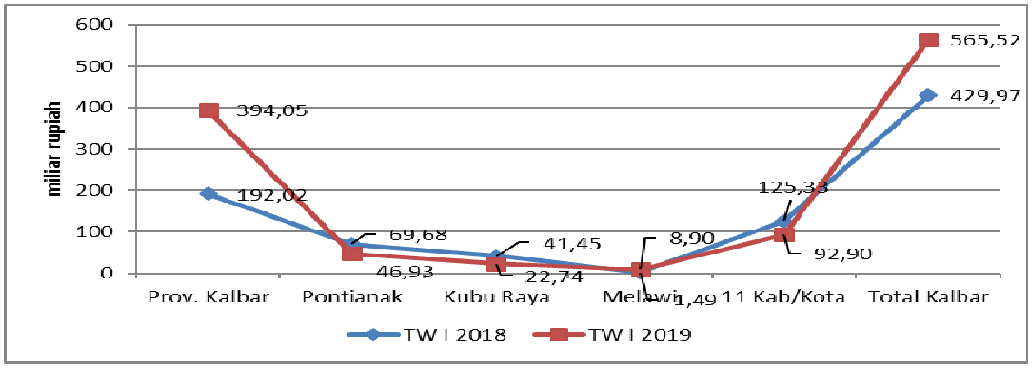

Sumber: DPKAD Kab/Kota, diolah.

b. Penerimaan Retribusi Daerah

Grafik III.3 Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Kota Lingkup Provinsi Kalbar Triwulan I Tahun 2018 dan Tahun 2019

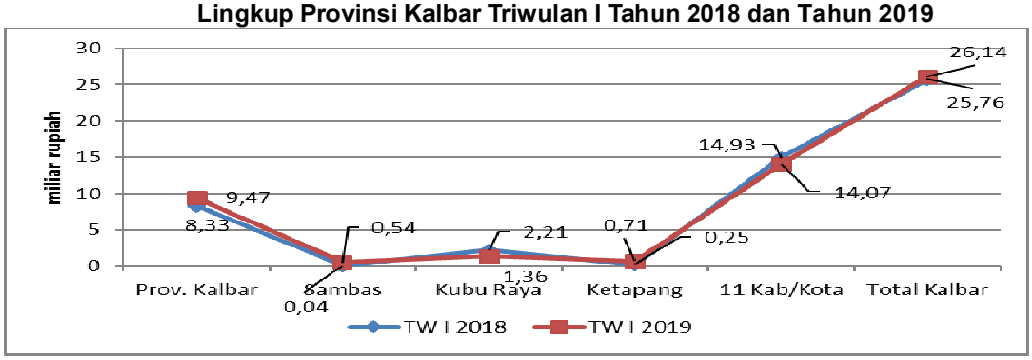

Sumber: DPKAD Kab/Kota, diolah

Pada Triwulan I tahun 2019 Penerimaan Retribusi Daerah Pemprov Kalimantan Barat mencapai Rp 26.14 miliar atau 17.96 persen dari target sebesar 145 miliar. Terjadi penurunan 0,68 persen dibanding periode yang sama tahun 2018. Prosentase kenaikan terbesar terjadi PAD Pemkab Sambas sebesar 1.200 persen. Dari 0.04 menjadi 0.54 miliar pada tahun ini.

c. Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Grafik III.4 Realisasi Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Triwulan I Tahun 2018 dan Tahun 2019

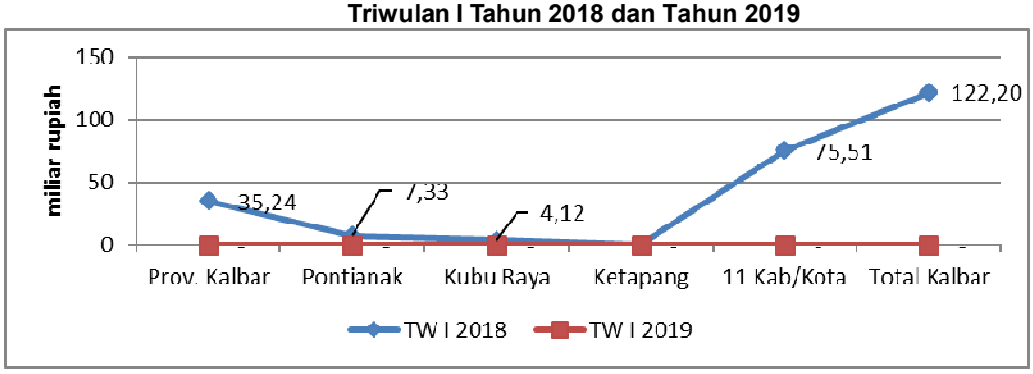

Sumber: DPKAD Kab/Kota, diolah

Pada Triwulan I tahun 2019 sampai dengan laporan ini disusun belum ada data hasil kekayaan daerah yang dipisahkan sampai dengan triwulan I, sehingga belum dapat dilakukan analisa.

2. Pendapatan Transfer

Grafik III.5 Realisasi Pendapatan Transfer Triwulan I tahun 2018 dan tahun 2019

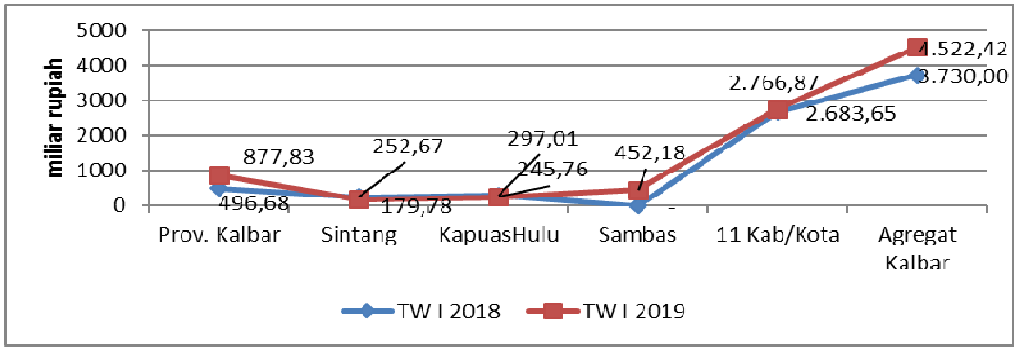

Sumber: DPKAD Kab/Kota, diolah

Realisasi Pendapatan transfer dari pemerintah pusat pada Triwulan I tahun 2019 sebesar Rp 4.522 miliar atau 21.82 persen dari alokasi dana transfer tahun 2019 sebesar Rp 20,721 miliar. Provinsi Kalbar merupakan Pemda dengan kenaikan terbesar disbanding tahun yang lalu yaitu sebesar 76.74 persen

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah (LLPD) berupa pendapatan hibah, pendapatan darurat dan pendapatan lainnya termasuk hibah langsung yang diterima oleh Pemda lingkup Provinsi Kalbar pada Triwulan I Tahun 2019 , adalah sebagai berikut:

Grafik III.6 Realisasi LLPD Yang Sah pada Triwulan I Tahun 2018 dan Tahun 2019.

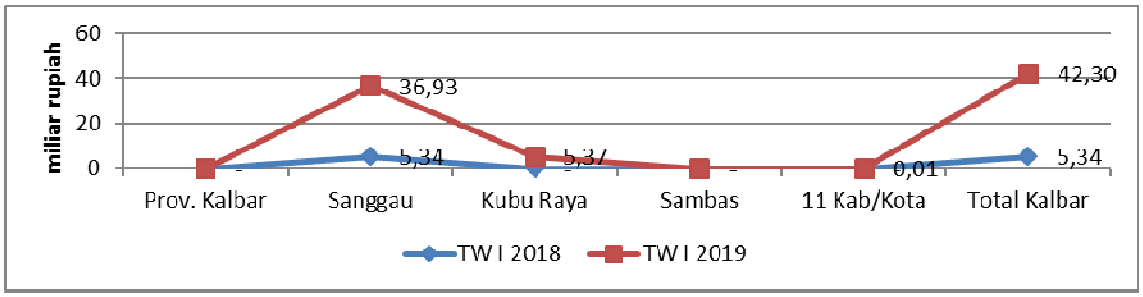

Sumber: DPKAD Kab/Kota, diolah

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Triwulan I tahun 2019 sebesar Rp 42.3 miliar atau sebesar 4.45 persen dari target tahun 2019 yaitu Rp 950 miliar dan terjadi kenaikan sebesar 4 persen dibanding periode yang sama tahun 2018.

B. Belanja Daerah

1. Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal

Realisasi Belanja Pegawai pada Triwulan I tahun 2019 mencapai Rp 1,242 miliar dan mengalami kenaikan sebesar 1.58 persen dibanding periode yang sama tahun 2018. Pemprov Kalbar merupakan Pemda dengan realisasi terbesar yaitu Rp 195 miliar. Realisasi Belanja Barang mencapai Rp 394 miliar atau 13.28 persen dari pagu dan mengalami penurunan sebesar 1.26 persen dibanding periode yang sama tahun 2018. Prov Kalbar merupakan Pemda dengan realisasi terbesar yaitu Rp 91 miliar.

Grafik III.7
Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal Lingkup Provinsi Kalimantan Barat pada Triwulan I Tahun 2018 dan Tahun 2019

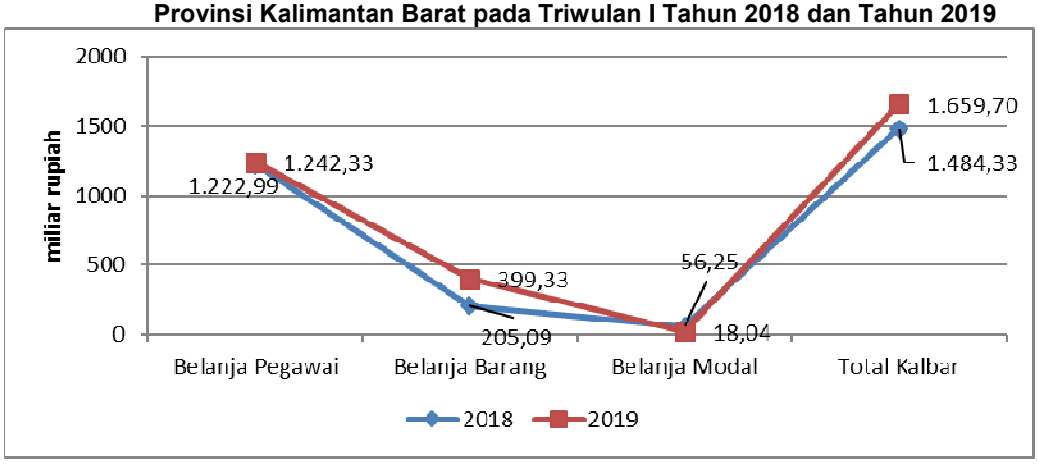

Sumber: DPKAD Kab/Kota, diolah

Realisasi Belanja Modal mencapai Rp 18 miliar atau sebesar 0,35 persen dari pagu dan terjadi penurunan sebesar 0.77 persen dibanding periode yang sama tahun 2018. Pemprov Kalbar dengan realisasi terbesar yaitu Rp 8.7 miliar

2. Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Urusan

Grafik 19. Pagu dan Realisasi Belanja Berdasarkan Urusan Lima rusan Tertinggi) Lingkup Provinsi Kalimantan Barat pada triwulan I Tahun 2019

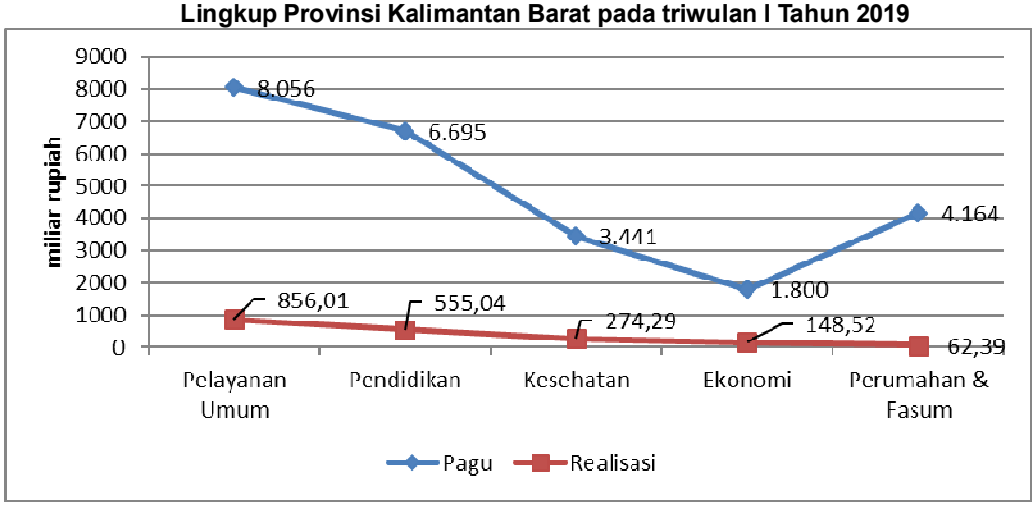

Sumber: DPKAD Kab/Kota, diolah (11 Kab/Kota)

Bidang Administrasi Pemerintahan Umum mendapat alokasi dana terbesar yaitu Rp 8.056 miliar namun bidang pendidikan, perumahan, fasilitas umum dan kesehatan juga menjadi prioritas, hal tersebut tercermin dari besarnya alokasi dana yang dianggarkan. Pada bidang pendidikan mendapatkan alokasi sebesar Rp 6.695. Untuk bidang kesehatan mendapat alokasi dana sebesar Rp 3.441.

C. Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Akhir Tahun 2019

Pendapatan Daerah pada tahun 2019 diperkirakan naik 2.78 persen dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp menjadi 25.112 miliar, sementara itu Belanja Daerah diperkirakan mengalami penurunan sebesar 0.76 persen dari tahun sebelumnya menjadi sebesar Rp 24.807 miliar. Peningkatan tersebut diharapkan dapat mempercepat pada pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat dan menciptakan lapangan pekerjaan.

Perkiraan realisasi APBD dalam lingkup Provinsi Kalbar sampai dengan akhir tahun 2019 untuk Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 12. Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Kalimantan Barat Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2019

URAIAN		Realisasi TW I 2018			Realisasi TW I 2019		Prognosis 2019	
	Pagu	Rlss	persen	Pagu	Realisasi	persen	Realisasi	persen
PENDAPATAN	24,433.26	4,378.37	17.92	25,434.50	5,264.68	20.70	25,112.32	102.78
PAD	3,606.21	643.02	17.83	3,762.76	699.95	18.60	3,634.02	100.77
Transfer	19,768.97	3,730.00	18.87	20,721.81	4,522.42	21.82	20,353.43	102.96
LLPAD	1,058.09	5.35	0.51	949.92	42.30	4.45	1,099.86	103.95
BELANJA DAERAH	24,998.29	2,101.01	8.40	26,044.05	1,990.21	7.64	24,807.58	99.24
Belanja	21,546.33	2,067.71	9.60	22,145.33	1,928.87	8.71	21,355.31	99.11
Transfer	3,451.97	33.30	0.96	3,898.72	61.34	1.57	3,472.98	100.61
SRPLS/DFST	-565.03	2,277.36	(403.05)	-609.55	3,274.46	(537.20)	304.74	153.93

Sumber: DPKAD (diolah)

IV. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)

A. LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN

Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) adalah laporan yang disusun berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian tingkat Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kalbar pada Triwulan I tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel IV.1
Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Lingkup Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Triwulan I Tahun 2018/2019

Dalam miliar

Uraian	TW I 2019				TW I 2018
	Pusat	Daerah	Konsolidasian	Kenaikan (%)	Konsolidasian
Pendapatan Negara	1.497,09	812,60	2.309,70	13,96	2.026,81
Pendapatan Perpajakan	1.371,98	565,52	1.937,51	14,74	1.688,67
Pendapatan Bukan Pajak	125,11	247,08	372,19	10,07	338,13
Hibah	-	-	-	-	0,01
Transfer	-	4.152,34*	-	-	-
Belanja Negara	1.259,71	1.990,21	3.249,93	(4,52)	3.403,72
Belanja Pemerintah	1.259,71	1.928,87	3.188,59	(5,40)	3.370,51
Transfer	4.152,34*	61,34	61,34	84,70	33,21
Surplus/Defisit	237,38	(1.177,61)	(940,23)	18,48	(1.376,91)
Pembiayaan	-	1,27	1,27	20,13	68,50
Penerimaan Pembiayaan Daerah	-	153,91	153,91	(74,63)	275,50
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	152,64	152,64	(18,48)	207,00
Sisa Lebih (Kurang)	237,38	(1.176,34)	(938,96)	(20,13)	(1.308,41)

Catatan: *Seluruh Pengeluaran Transfer Pemerintah Pusat dieliminasi dengan Penerimaan Transfer Pemerintah Daerah.
Sumber: LKPK Kanwil DJPB (diolah)

Pendapatan konsolidasian mengalami peningkatan 14 persen disebabkan oleh peningkatan pendapatan perpajakan sebesar Rp248,83 miliar rupiah dibanding periode yang sama tahun 2018. Belanja Negara mengalami penurunan 5 persen karena berkurangnya belanja sebesar Rp181,92 miliar..

B. PENDAPATAN KONSOLIDASIAN

1. Analisis Proporsi dan Perbandingan

Grafik IV.1
Perbandingan Komposisi pendapatan Konsolidasi Triwulan I Tahun 2018/2019

Dalam miliar

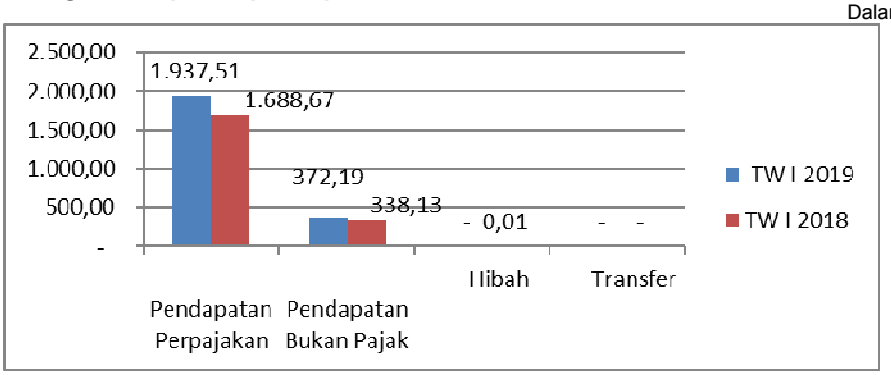

Sumber: LKPK Kanwil DJPB (diolah)

Persentase pendapatan pajak mengalami peningkatan sebesar 14,74 persen sementara pendapatan bukan pajak naik 10,07 persen. Kenaikan tersebut antara lain disumbang

oleh hasil kenaikan pendapatan pajak dalam negeri sebesar Rp188,12 miliar.

Grafik IV.2
Perbandingan Penerimaan Pemerintah Pusat dan Daerah Terhadap Penerimaan Konsolidasian Triwulan I Tahun 2018/2019

Dalam miliar

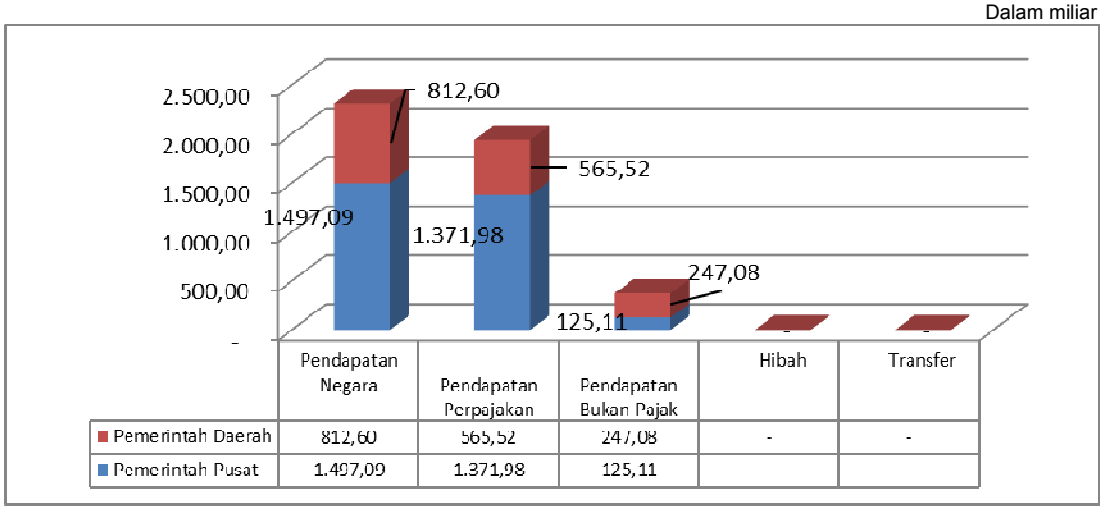

	Pendapatan Negara	Pendapatan Perpajakan	Pendapatan Bukan Pajak	Hibah	Transfer
Pemerintah Daerah	812,60	565,52	247,08	-	-
Pemerintah Pusat	1.497,09	1.371,98	125,11		

Sumber: LKPK Kanwil DJPB (diolah)

Kontribusi pendapatan Pemerintah Pusat sebesar 64,82 persen terhadap pendapatan konsilidasi, sementara pendapatan Pemerintah Daerah berkontribusi sebesar 35,12 persen terhadap pendapatan konsolidasi..

2. Analisis Perubahan

Realisasi pendapatan konsolidasian pada triwulan III tahun 2018 mencapai Rp 8,97 triliun, naik sebesar Rp 2,43 triliun (23,15 persen) dari periode yang sama tahun 2017 yang sebesar 6,54 triliun. Sebagian besar kenaikan tersebut ditunjang oleh kenaikan pendapatan pajak sebesar 29.4 persen dan pendapatan bukan pajak 96,23 persen. Hal ini menggambarkan tingkat pertumbuhan perekonomian cukup baik.

Grafik IV.3
Perbandingan Penerimaan Perpajakan Pemerintah Pusat dan Daerah terhadap Penerimaan Perpajakan Konsolidasian Provinsi Kalbar Triwulan I Tahun 2019

.

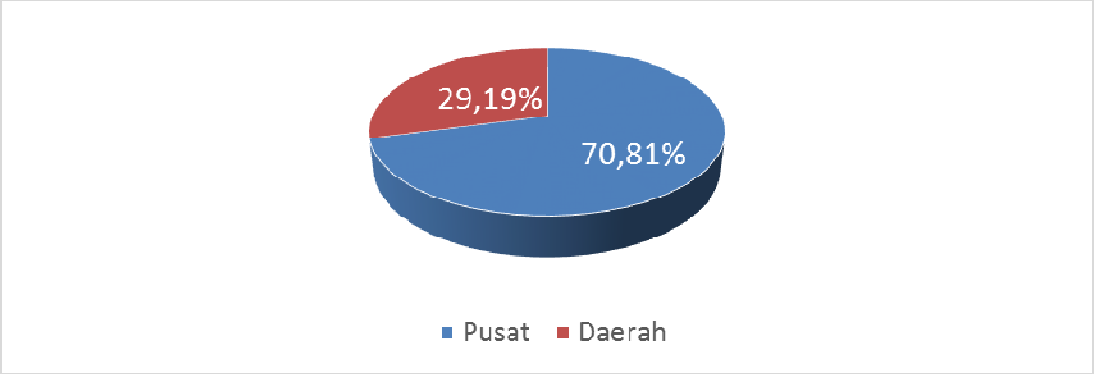

Sumber: LKPK Kanwil DJPB (diolah)

Kontribusi pendapatan pajak pusat mencapai sebesar Rp 1,37 triliun (70,81 persen), sedangkan pendapatan pajak dari daerah sebesar Rp 565,52 miliar (29,19 persen). Pemda diharapkan untuk dapat lebih mengoptimalkan serta mencari alternatif sumber

pendapatan pajak daerah. Agar komposisi pendapatan pajak mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya.

3. Analisis Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kenaikan Realisasi Pendapatan Konsolidasian

Tabel IV.2
Realisasi Pendapatan Konsolidasian Pemerintah Pusat dan Pemda di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Triwulan I Tahun 2018/2019

Uraian	TW I 2018 (Miliar)	TW I 2019 (Miliar)	Kenaikan (Penurunan) %
Pendapatan Perpajakan	1.688,67	1.937,51	14,74
Pendapatan Bukan Pajak	338,13	372,19	10,07
Total	2.026,80	2.309,70	13,96
Pertumbuhan Ekonomi	5,11%	5,07	(0,04)

Sumber: LKPK Kanwil DJPB (diolah)

Pada Triwulan I tahun 2018 dengan total pendapatan Rp2,06 triliun, pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat sebesar 5,11 persen. Sementara pada Triwulan I tahun 2019 dengan total pendapatan RP2,30 triliun, pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 5,07 persen.

C. BELANJA KONSOLIDASIAN

1. Analisis Proporsi dan Perbandingan

Grafik IV.4
Perbandingan Belanja dan Transfer Pemerintah Pusat dan Pemda terhadap Belanja dan Transfer Konsolidasian pada Provinsi Kalbar Triwulan I Tahun 2018/2019

Miliar rupiah

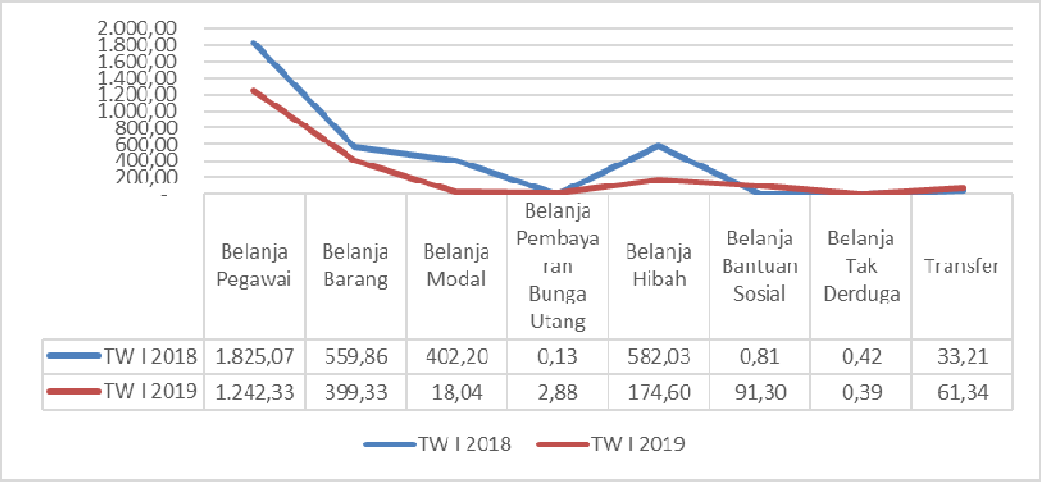

Sumber: LKPK Kanwil DJPB (diolah)

Realisasi Belanja Pegawai Konsolidasian pada Triwulan I tahun 2019 mencapai Rp 1,99 triliun, turun 41,35 persen dibanding periode yang sama tahun 2018. Penurunan ini didorong oleh penurunan belanja pegawai sebesar Rp582,74 miliar, belanja barang sebesar Rp160,53 miliar, belanja modal sebesar Rp384,15 miliar, dan belanja hibah

sebesar Rp407,02 miliar.

2. Analisis Perubahan

Realisasi belanja konsolidasian pada triwulan III tahun 2018 mencapai Rp 22,2 triliun, naik 32 persen dari periode yang sama tahun 2017.

Grafik IV.5
Komposisi Belanja Konsolidasian Provinsi Kalbar Triwulan I Tahun 2018/2019

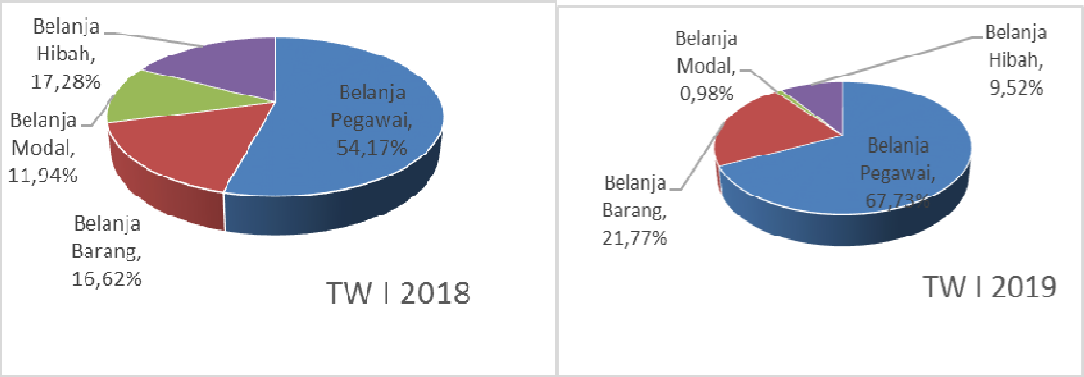

Sumber: LKPK Kanwil DJPB (diolah)

3. Analisis Dampak Kebijakan Fiskal Kepada Indikator Ekonomi Regional

Belanja Negara konsolidasian pada Triwulan I Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp0,15 triliun namun PDRB meningkat sebesar Rp1,60 triliun, tingkat pengangguran terbuka menurun 0,08 persen, dan kemiskinan menurun 0,51 persen. Angka-angka ini menunjukkan bahwa pada triwulan I tahun 2019 belanja konsolidasian berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan PDRB, penurunan angka pengangguran terbuka, dan tingkat kemiskinan.

Tabel IV.3
Komposisi Belanja Negara Konsolidasian dan Indikator Makro Ekonomi Provinsi Kalbar Triwulan I Tahun 2018/2019

Indikator	TW I 2018	TW I 2019
Belanja Konsolidasian (triliun)	3,40	3,25
PDRB ADHK (triliun)	32,15	33,75
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,22	4,14
Kemiskinan (%)	7,88	7,37

Sumber: LKPK Kanwil DJPB (diolah)

D. ANALISIS KONTRIBUSI PEMERINTAH DALAM PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Nilai PDRB suatu daerah dapat dihitung dengan menggunakan pendekatan pengeluaran yaitu: Y = C + I + G + (X-M). KeteranganY= Pendapatan Nasional, C= Konsumsi Rumah Tangga, I= Investasi, G= Belanja Pemerintah, X= Ekspor, dan M= Impor. Maka akan diperoleh hasil analisis kontribusi Pemerintah terhadap PDRB (ADHK) dari belanja Pemerintah dan investasi Pemerintah, sebagai berikut :

Tabel IV.4

Kontribusi Belanja dan Investasi Pemerintah Dalam Pembentukan PDRB Provinsi Kalmantan Barat Triwulan I tahun 2019

Dalam Miliar

Pendapatan Daerah Y	33.756,97
Konsumsi Rumah Tangga C	N/A
Investasi Pemerintah (I)	18,04
(Ekspor-Impor) M	N/A
Government Spending G	1.990,21

Kontribusi belanja pemerintah terhadap pembentukan PDRB adalah sebesar 5,89 persen dan kontribusi investasi pemerintah adalah 0,05 persen. Pada Triwulan I 2019 kontribusi Pemerintah terhadap PDRB dapat dikatakan masih sangat kecil. Hal ini terjadi karena masih rendahnya tingkat belanja pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

V. BERITA/ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH

A. PLTN Pertama Indonesia Dibangun Di Kalbar

Titik terang pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) yang pertama di Indonesia sudah jelas dan akan dibangun pada wilayah Provinsi Kalimantan Barat, hal ini ditandai dengan pelaksanaan survey lokasi pembangunan PLTN oleh Kementerian Riset, Tehnologi dan Pendidikan Tinggi. Akan dilakukan survey pada 3 (tiga) lokasi yakni Kabupaten Bengkayang, Sambas dan Ketapang. Ketiganya dipilih karena paling memungkinkan apabila dilihat dari potensi kegempaan, jarak dengan penduduk serta aspek social lainnya. Tahun 2021 diharapkan sudah dilaksanakan *groundbreaking*.

PLTN yang akan dibangun nanti benar-benar aman karena sudah menggunakan tehnologi yang bisa mengamankan bangunan reaktor itu sendiri jika terjadi bencana. Pada tahap awal akan dibangun PLTN Mini (prototype) dengan skala komersial berkapasitas sekitar 100 MW. Jika sudah berhasil dengan tahap awal, kedepannya Kemenristekdikti baru akan melakukan pengembangan yaitu PLTN yang menghasilkan energi sebesar 300 MW, 600 MW hingga 1GW.

Dari kalangan swasta juga siap membangunan PLTN di Kalbar diantaranya adalah perusahaan energi asal Amerika Serikat ThorCon International PTE Ltd. Teknologi nuklir generasi ke-empat yang ditawarkan ThorCon sendiri hanya memakai uranium 15% selebihnya thorium, yang di Indonesia ketersediannya cukup berlimpah bahkan di duga cukup untuk 1000 tahun. Thorium Molten Salt Reactor (TMSR) yang lebih popular disebut Pembangkit Listrik Tenaga Thorium (PLTT) bukan saja sangat aman dan tidak ada emisi dengan tapak kecil sehingga ramah lingkungan tetapi secara ekonomis dapat bersaing dengan batubara.

PLTT dapat menjadi terobosan bagi masyarakat untuk mendapatkan listrik murah dan handal. ThorCon telah menunjukkan minat membangun PLTN berbasis Thorium dengan investasi swasta (tanpa APBN) sebesar US$ 935 Juta atau setara dengan Rp13 Triliun untuk PLTT 2 X 500MW. Berdasarkan perhitungan, PLTT di Kalbar mampu menjual listrik di bawah BPP Nasional, antara 6-7 sen per kwh sehingga dapat menurunkan Biaya Pokok Pembangkitan (BPP) Kalbar pada kisaran $10 sen per kwh yang akan berdampak tumbuhnya berbagai industri dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dari 10 (sepuluh) Negara terpadat penduduknya di dunia hanya Indonesia yang belum memiliki PLTN. Pembangunan PLTN di Kalbar bisa terwujud dikarenakan komitmen yang kuat dari Kepala Daerah. Hal ini merupakan pertama kalinya Gubernur berani memunculkan dan mengajukan pembangunan PLTN di daerahnya.

Gubernur Kalbar menyatakan :

"Selain untuk kebutuhan industri, dengan adanya PLTN ia ingin agar masyarakat bisa mendapatkan pasokan listrik yang murah. Perkiraannya dengan PLTN, tarif listrik yang harus dibayar bisa setengah dari yang ada saat ini, bahkan tidak sampai separuh, nah kalau sekarang 10 sen dolar AS per kWh, kedepan bisa dibawah 5 sen dolar AS per kWh"

"Dampak jangka panjangnya adalah daerah bakal cepat meningkatkan daya saing.
Serta mampu menarik banyak investor dari luar"

"PLTN itu paling aman, dimana-mana itu aman, Jepang saja yang kena banjir, kena tsunami tidak apa-apa" *(Pontianak Post)*

B. Kratom Tanaman Penghasil Dollar

Kratom adalah tanaman psikoaktif yang dimanfaatkan sebagai jamu dan ramuan medis tradisonal di sejumlah wilayah Asia Tenggara sejak ribuan tahun silam. Kratom (*Mitragyna speciosa*) termasuk dalam tanaman keluarga kopi. Tanaman ini tumbuh setinggi 4-16 meter dan masyarakat biasa memanfaatkan bagian daunnya yang memiliki lebar melebihi telapak tangan orang dewasa. Sejak dulu, dimanfaatkan sebagai 'obat ajaib' segala penyakit, mulai dari kecanduan opioid, penghilang rasa sakit, diyakini berkhasiat mendongkrak produktivitas kerja serta mengusir rasa lelah. Cara mengkonsumsi daun kratom adalah dengan cara dikunyah seperti daun sirih ataupun diseduh layaknya teh.

Kratom dengan kandungan mitraginin terbaik hanya tumbuh di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalbar, merupakan satu-satunya daerah di Indonesia sebagai penghasil dan pengekspor daun kratom kering terbesar ke Amerika Serikat selain itu ke Canada, China dan Peru.. Warga menanam tanaman ini di halaman rumah, bantaran sungai, hingga di sisi kiri dan kanan jalan raya. Tanaman ini kelihatan dapat tumbuh subur di daerah Nanga Kalis salah satu kecamatan di Kapuas Hulu, tanpa perlu perawatan berarti, hingga tiba masa panen dalam hitungan setahun setelah tanam.

Nilai ekonomisnya memang menggiurkan. Menurut laporan AFP, di pasar global, serbuk daun kratom dihargai 30 USD per kilogramnya atau Rp420 ribu dengan kurs Rp14.000/USD, dalam sebulan dari Kalbar saja sekitar 400 ton daun kratom kering dikirim keluar dengan nilainya sekitar 12 juta USD. Kantor pos pusat di Pontianak menjadi pos perdagangan utama kratom. "Sekitar 90% dari pengiriman kami dari Kalbar adalah kratom yang dijual ke AS," kata kepala kantor pos Zaenal Hamid. Namun harga di tingkat petani untuk kualitas super atau terbaik, dijual antara Rp70 ribu hingga Rp80 ribu per kilogram.

Amerika Serikat menjadi pangsa pasar terbesar dengan konsumen setidaknya telah mencapai 15 juta, mereka sangat berharap adannya perbaikan kualitas produk bahan baku kratom Indonesia. Oleh karena itu diperlukan fasilitas pengolahan yang sesuai dengan standar Good Manufacturing Process (GMP), namun hal ini menjadi suatu kesulitan tersendiri, dikarenakan regulasi di Indonesia belum memberikan kepastian. Permenkes 12 Tahun 2009 mencantumkan bahwa kratom salah satu jenis narkotika, namun pada Permenkes 2/2017 kratom sudah tidak termasuk jenis yang dilarang. Regulasi yang abu-abu ini akan berdampak pada keragu-raguan pengusaha untuk berinvestasi pada fasilitas pengolahan yang sesuai GMP. Pada saat ini kratom sebagai komoditas Hasil Hutan Bukan Kayu.

Besarnya permintaan dari AS lantaran komoditas ini juga sebagai bahan baku obat, banyak hasil penelitian menyatakan potensi sangat besar dan dapat dikembangkan sebagai obat analgesic baru. Karena itu Kalbar khususnya dapat dikembangkan menjadi produsen bahan baku ekstrak terstandar dari daun kratom.

Mengingat besarnya potensi ekonomi dan budidaya, maka diharapkan Pemerintah segera mengambil langkah yang bijaksana tentang kepastian legalitas kratom